

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bisnis semakin bersaing di era perdagangan bebas karena batasan geografis yang dulunya membatasi aktivitas usaha kini semakin berkurang. Kondisi ini semakin kompleks dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru serta pengembangan usaha yang agresif oleh perusahaan yang sudah mapan. Ini berarti bahwa perusahaan harus membuat rencana untuk mempertahankan keberlanjutan dan daya saing. Adapun tindakan strategis yang dapat diambil adalah menetapkan tujuan keberlanjutan yang jelas dan menantang guna memastikan daya saing jangka panjang dan kesehatan keuangan perusahaan sebagai fondasi untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. *Goal-Setting Theory* (Locke & Latham, 1990) menyatakan bahwa organisasi dengan tujuan yang spesifik dan menantang akan lebih termotivasi untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Selain itu, *Stakeholder Theory* menegaskan bahwa keberlanjutan perusahaan juga dipengaruhi oleh kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, pemerintah, dan masyarakat (Freeman, 1984). Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan, perusahaan perlu memastikan bahwa strategi pengelolaan lingkungan dan tata kelola yang diterapkan tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, pengungkapan kinerja lingkungan dan tata kelola perusahaan menjadi mekanisme penting untuk memenuhi harapan berbagai pihak dan memastikan perusahaan tetap kompetitif di pasar global.

Salah satu cara untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan keberlanjutan dan daya saing perusahaan adalah melalui analisis rasio keuangan. Menurut Horne dalam Kasmir (2015:104), rasio keuangan dibuat dengan membagi satu angka dengan angka lainnya untuk menghubungkan dua angka akuntansi. Analisis ini memberikan ringkasan menyeluruh mengenai situasi keuangan bisnis, yang berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategis dan penilaian efektivitas manajemen.

Perusahaan yang mempunyai kinerja keuangan yang baik cenderung mempunyai peluang lebih besar untuk menarik investasi, mengurangi risiko operasional, dan membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan. Penelitian oleh Febianty *et al.* (2023) menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan rasio likuiditas dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan minat investor. Mevelia *et al.* (2024) juga menemukan bahwa Return on Assets (ROA) yang tinggi mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola aset untuk mencapai profitabilitas. Di Indonesia, perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 merupakan entitas dengan kapitalisasi pasar tertinggi, likuiditas saham yang baik, serta reputasi yang kuat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berperan sebagai motor penggerak ekonomi nasional, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas pasar keuangan, peningkatan jumlah lapangan kerja, dan peningkatan daya saing ekonomi di seluruh dunia. Dengan latar belakang tersebut, penetapan tujuan yang jelas dalam pengelolaan lingkungan dan tata kelola menjadi faktor kunci bagi perusahaan dalam mempertahankan keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang.

Menurut laporan S&P Global pada COP28 di Dubai tahun 2023, perusahaan global, termasuk di Indonesia, semakin dihadapkan pada tantangan untuk mengadopsi

standar keberlanjutan dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan emisi gas rumah kaca. Pendanaan berbasis keberlanjutan dan investasi hijau telah menjadi elemen penting dalam mendukung transisi energi serta keberlanjutan jangka panjang. Hal ini menegaskan pentingnya penetapan target lingkungan yang jelas dan terukur bagi perusahaan di Indeks LQ45, sesuai dengan prinsip *Goal-Setting Theory*, di mana perusahaan yang memiliki target spesifik lebih mampu mencapai hasil yang optimal (Eccles *et al.*, 2014).

Dengan demikian, tata kelola perusahaan (*corporate governance*) memiliki peran penting dalam memastikan perusahaan dapat menetapkan, mengelola, dan mencapai target keberlanjutan yang telah ditentukan. Menurut Tricker (2015), tata kelola yang baik meningkatkan transparansi melalui penyampaian informasi yang jelas dan akurat serta memperkuat akuntabilitas dengan pengawasan yang efektif. Tata kelola yang efektif juga dapat meningkatkan motivasi internal perusahaan untuk mencapai tujuan lingkungan yang telah ditetapkan, mengoptimalkan efisiensi operasional, dan meningkatkan daya saing perusahaan.

Lebih lanjut, minat terhadap investasi berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. Menurut laporan *Global Sustainable Investment Alliance* (GSIA, 2022), total aset yang diinvestasikan pada instrumen berkelanjutan secara global mencapai US\$30,3 triliun. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa sejak tahun 2020, terjadi peningkatan sebesar 20% dalam aset berkelanjutan di pasar non-Amerika Serikat, meskipun terdapat penurunan di pasar Amerika Serikat akibat penerapan standar keberlanjutan yang lebih ketat. *Goal-Setting Theory* menjelaskan bahwa dengan adanya peningkatan tren investasi ini, perusahaan yang menetapkan tujuan keberlanjutan yang lebih spesifik memiliki insentif lebih besar

untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut guna menarik lebih banyak investor dan meningkatkan profitabilitas (Kolk & Perego, 2014).

Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Toly (2019) menemukan bahwa sementara pengungkapan kinerja lingkungan mengurangi hubungan antara nilai perusahaan dan pengungkapan emisi gas rumah kaca, baik pengungkapan emisi gas rumah kaca maupun kinerja lingkungan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian lainnya oleh Lastiningsih *et al.* (2020) juga menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan dan kinerja lingkungan sangat berdampak positif pada kinerja keuangan bisnis. Namun, terdapat perspektif yang berlawanan. Cho dan Patten (2007) mengungkapkan bahwa pengungkapan lingkungan sering digunakan hanya sebagai alat legitimasi tanpa dampak nyata pada kinerja keuangan. Wagner *et al.* (2002) menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan transparansi lingkungan dapat meningkatkan biaya operasional, yang justru berdampak negatif terhadap profitabilitas. Penelitian oleh Kartika Sari dan Mediaty (2020) juga menunjukkan bahwa akuntansi lingkungan yang dapat berupa pengungkapan lingkungan dapat memiliki dampak yang beragam terhadap kinerja perusahaan, dampak tersebut dapat meningkatkan biaya dan menurunkan laba perusahaan. Oleh karena itu, masih terdapat perdebatan mengenai efektivitas pengungkapan kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Selain dari pada itu, perusahaan memerlukan sumber daya dan keterampilan khusus untuk terapkan tata kelola perusahaan yang baik serta membuat laporan kinerja lingkungan. Proses ini dapat berdampak pada kinerja keuangan dan operasional bisnis. Dengan mempertimbangkan berbagai temuan tersebut, penelitian ini akan mengidentifikasi pengaruh penetapan target lingkungan dan tata kelola perusahaan

terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indeks LQ45 pada tahun 2021–2023. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur terkait pengungkapan keberlanjutan dan tata kelola perusahaan serta kontribusi praktis bagi perusahaan dalam merumuskan kebijakan keberlanjutan yang lebih optimal dan efisien dalam penggunaan sumber daya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, masalah penelitian dapat dirumuskan:

1. Apakah pengungkapan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam indeks LQ45?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan di indeks LQ45?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pengungkapan kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham LQ45 periode 2021-2023.
2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh proporsi komisaris independen perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham LQ45 periode 2021-2023.
3. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham LQ45 periode 2021-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur akademik terkait hubungan antara pengungkapan *environmental performance*, *good corporate governance* (GCG), dan kinerja keuangan, khususnya dalam konteks perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45. Penelitian ini juga memperkuat teori legitimasi dan teori

stakeholder, yang menyoroti pentingnya transparansi dan tata kelola dalam memenuhi ekspektasi masyarakat serta meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, hasil penelitian ini mampu menjadi rujukan bagi studi-studi lanjutan yang lebih mendalam di sektor industri lain atau periode waktu yang lebih luas.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini menawarkan perspektif kepada manajemen perusahaan tentang pentingnya pengungkapan kinerja lingkungan dan *corporate governance* yang baik untuk membangun kepercayaan investor serta meningkatkan kinerja keuangan. Bagi investor, temuan penelitian ini memberikan panduan dalam membuat keputusan investasi yang berfokus pada keberlanjutan. Selain itu, penelitian ini mampu menjadi referensi bagi regulator dalam merumuskan kebijakan pelaporan lingkungan dan *corporate governance* yang mendukung transparansi pasar. Praktisi keuangan juga dapat memanfaatkan temuan ini untuk menilai kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan aspek non-finansial dalam konteks investasi berkelanjutan.

1.4.3. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan mengikuti sistematika penulisan yang terstruktur rapi, dengan tujuan supaya pembaca mudah memahami keseluruhan proses serta hasil penelitian. Adapun urutan penulisan di penelitian ini dimulai Bab I, Pendahuluan. Di bab ini, dijelaskan latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah yang ingin dijawab, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian tersebut. Selain itu, bab ini juga menguraikan secara singkat sistematika penulisan yang digunakan di skripsi ini.

Selanjutnya, Bab II, yakni Tinjauan Pustaka, disajikan berbagai teori yang menjadi landasan pemikiran penelitian ini. Bab ini juga membahas definisi konsep-

konsep dasar yang relevan dengan topik yang diangkat, serta menyajikan teori-teori serta hasil-hasil penelitian terdahulu terkait masalah yang diteliti. Tujuannya yakni memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait isu yang jadi fokus penelitian.

Di dalam Bab III, yang berjudul Metode Penelitian, dijelaskan secara rinci mengenai desain penelitian yang digunakan, tempat serta waktu penelitian berlangsung, serta populasi serta sampel yang menjadi subjek penelitian. Bab ini juga menguraikan jenis data yang digunakan, bagaimana data tersebut dikumpulkan, serta teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini. Di sini juga dijelaskan variabel yang diteliti beserta definisi operasionalnya, instrumen yang digunakan, serta langkah-langkah menganalisis data.

Pada Bab IV, yang berjudul Hasil dan Pembahasan, diungkapkan gambaran umum terkait objek penelitian, diikuti dengan deskripsi data yang telah dikumpulkan. Bab ini juga memaparkan hasil dari uji kualitas data, uji asumsi klasik, hingga hasil uji hipotesis yang menjadi inti dari penelitian. Semua temuan ini dibahas secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hasil yang diperoleh.

Terakhir, di Bab V yang berjudul Penutup, disimpulkan temuan-temuan utama dari penelitian ini. Bab ini juga mencakup pembahasan tentang keterbatasan yang ada dalam penelitian serta saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya atau untuk praktik yang relevan.

Diharapkan para pembaca dapat memahami secara menyeluruh proses-proses yang dilakukan dalam penelitian serta hasil-hasil yang dicapai dengan bantuan sistem penulisan terstruktur ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan teori yakni kumpulan konsep serta teori untuk memberikan penjelasan terkait variabel-variabel yang diteliti di suatu penelitian. Landasan ini berfungsi sebagai acuan untuk menjawab rumusan masalah sementara, serta menjadi dasar dalam penyusunan instrumen penelitian. Menurut Sugiyono (2013), landasan teori berfungsi untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait fenomena yang sedang diteliti dan mendukung merumuskan hipotesis penelitian. Sebagaimana dijelaskan oleh Sekaran dan Bougie (2016), landasan teori tidak hanya menjelaskan hubungan antar variabel tetapi juga memberikan panduan dalam pengembangan instrumen yang digunakan saat proses penelitian.

2.1.1. Teori *Stakeholder*

Teori *Stakeholder*, yang pertama kali diperkenalkan Freeman (1984), menekankan perusahaan bertanggung jawab tidak hanya pada pemegang saham (*shareholders*), tapi juga ke berbagai pihak yang terlibat di aktivitas perusahaan. *Stakeholder* mencakup berbagai kelompok, seperti konsumen, karyawan, pemasok, masyarakat umum, pemerintah, investor, dan bahkan lingkungan. Dalam pandangan ini, perusahaan diharapkan untuk memperhatikan kebutuhan dan harapan *stakeholder* secara luas, tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata.

Menurut Freeman (1984), untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang, perusahaan harus mengelola hubungan dengan berbagai *stakeholder*, menjaga kepentingan mereka, serta menciptakan nilai bersama. Hubungan yang baik dengan

stakeholder menjadi elemen penting dalam mempertahankan reputasi dan keberlanjutan operasional perusahaan. Salah satu strategi kunci dalam menjaga hubungan ini adalah melalui pengungkapan kinerja lingkungan, yang menjadi sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan transparansi dan komitmen mereka terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan.

Dalam kerangka teori *stakeholder*, pengungkapan kinerja lingkungan memiliki peran krusial karena dapat memenuhi ekspektasi *stakeholder* yang semakin peduli terhadap isu-isu keberlanjutan dan dampak sosial dari aktivitas perusahaan (Schiopoiu Burlea & Popa, 2013). Transparansi dalam pengungkapan kinerja lingkungan tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tapi juga mekanisme untuk membangun kepercayaan *stakeholder* dan memperkuat hubungan jangka panjang. Gray *et al.* (1995) menyatakan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan adalah respons terhadap tuntutan *stakeholder* untuk transparansi dan tanggung jawab sosial. Mereka menemukan bahwa perusahaan yang memberikan pengungkapan yang lebih baik cenderung mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja jangka panjang perusahaan. Sebaliknya, pengungkapan yang buruk atau tidak transparan dapat menurunkan kepercayaan *stakeholder* dan merusak reputasi perusahaan.

Selanjutnya, Hess (2007) menekankan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan yakni Salah satu metode bagi perusahaan untuk penuhi ekspektasi *stakeholder* terkait tanggung jawab sosial serta lingkungan. Melalui transparansi yang baik, perusahaan dapat Mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dengan *stakeholder* dan memperkuat kredibilitas serta citra positif di hadapan publik. Penelitian oleh Lyon dan Montgomery (2015) juga mendukung pandangan ini, dengan menemukan bahwa pengungkapan

terkait isu lingkungan yang baik dapat memperkuat loyalitas pelanggan dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan *stakeholder* lainnya.

Teori *stakeholder* juga menekankan pentingnya *corporate governance* dalam mengelola hubungan dengan *stakeholder* secara transparan dan akuntabel. Tata kelola yang baik menciptakan mekanisme yang memastikan perusahaan dapat memenuhi harapan *stakeholder*, memperhatikan aspek keberlanjutan, serta mengelola risiko dengan lebih efektif. Tata kelola yang kuat mendukung pengambilan keputusan yang seimbang antara kepentingan *shareholder* dan kepentingan *stakeholder* lainnya, seperti konsumen, masyarakat, dan pemerintah.

Menurut Aguilera (2007), penerapan tata kelola yang efektif dapat mempererat hubungan antara perusahaan dan *stakeholder*, yang berpotensi mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif. Mereka menekankan bahwa perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik cenderung mempunyai reputasi yang lebih baik di mata investor, pelanggan, serta masyarakat. Tata kelola yang baik menjamin perusahaan tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan jangka pendek, tapi juga berupaya menjaga hubungan yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan untuk jangka panjang.

Penelitian oleh García-Sánchez *et al.* (2013) perusahaan yang terapkan praktik tata kelola yang baik cenderung mempunyai kinerja yang lebih stabil di pasar dan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari *stakeholder*. Mekanisme seperti transparansi dalam pengambilan keputusan, integritas dalam pelaporan keuangan, serta kebijakan yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan membantu meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan daya tarik perusahaan di hadapan investor.

Dalam konteks ini, pengungkapan kinerja lingkungan menjadi salah satu elemen penting dalam kerangka teori *stakeholder*. Perusahaan yang transparan dalam mengungkapkan aktivitas keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan tidak hanya memperkuat legitimasi sosial tetapi juga menarik perhatian investor yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan (Mazotta & Veltri, 2014; Kaspereit *et al.*, 2024).

Selain itu, transparansi lingkungan juga mengurangi ketidakseimbangan informasi antara perusahaan dan *stakeholder*, yang pada akhirnya mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat (Aguilera *et al.*, 2006).

Dengan demikian, teori pemangku kepentingan menyediakan dasar teoretis yang kokoh untuk memahami hubungan antara pengungkapan kinerja lingkungan, tata kelola perusahaan, dan kinerja finansial perusahaan. Dalam konteks perusahaan yang terdata di Indeks LQ45, pengungkapan kinerja lingkungan tidak hanya kewajiban hukum melainkan strategi penting untuk memperkuat hubungan dengan *stakeholder*, meningkatkan reputasi, serta mendukung stabilitas kinerja keuangan jangka panjang. Tata kelola perusahaan yang baik berperan krusial dalam pastikan hubungan antara perusahaan dan *stakeholder* dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan komitmen terhadap keberlanjutan.

Secara keseluruhan, pengungkapan kinerja lingkungan dan tata kelola perusahaan yang efektif bukan hanya strategi komunikasi, tetapi juga alat yang efektif untuk membangun kepercayaan, mengurangi konflik, dan mengoptimalkan keberlanjutan perusahaan dalam ekosistem bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif.

2.1.2. Teori *Goal-Setting*

Goal-Setting Theory dikembangkan oleh Locke dan Latham (1990) yang menekankan bahwa penetapan tujuan yang jelas, spesifik, dan menantang dapat meningkatkan kinerja individu maupun organisasi. Dalam konteks perusahaan, penerapan target keberlanjutan dan tata kelola yang baik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kinerja finansial yang lebih baik (Latham dan Pinder, 2005).

Dalam kaitannya dengan pengungkapan kinerja lingkungan, *Goal-Setting Theory* menjelaskan bahwa perusahaan yang menetapkan tujuan keberlanjutan yang spesifik lebih cenderung melakukan pengungkapan informasi yang transparan dan akurat mengenai dampak lingkungannya (Eccles *et al.*, 2014). Dengan menerapkan standar pelaporan seperti *Global Reporting Initiative*, perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan investor, serta memberikan sinyal positif terkait komitmen keberlanjutan (Dhaliwal *et al.*, 2011).

Dari perspektif tata kelola perusahaan, *Goal-Setting Theory* menyatakan bahwa keberadaan mekanisme pengawasan yang kuat, seperti dewan komisaris independen dan komite audit, dapat membantu perusahaan mencapai target keberlanjutan secara lebih efektif. Studi oleh Martínez-Ferrero *et al.* (2015) menemukan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang kuat cenderung lebih disiplin dalam mencapai tujuan lingkungan dan memiliki tingkat kepercayaan investor yang lebih tinggi.

Di Indonesia, perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ45 adalah perusahaan dengan kapitalisasi pasar besar dan likuiditas tinggi, sehingga transparansi dalam pengungkapan kinerja lingkungan serta tata kelola perusahaan sangat berperan dalam menarik minat investor.

Perusahaan yang memiliki strategi keberlanjutan yang terukur dan dikendalikan melalui mekanisme tata kelola yang ketat lebih mampu mendapatkan kepercayaan dari investor dan regulator (Serafeim *et al.*, 2014). Selain itu, dengan meningkatnya perhatian terhadap keberlanjutan di pasar modal Indonesia, perusahaan di Indeks LQ45 yang secara aktif mengadopsi prinsip keberlanjutan akan lebih kompetitif dibandingkan perusahaan yang hanya berfokus pada profitabilitas jangka pendek.

Beberapa regulasi di Indonesia, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, mewajibkan perusahaan untuk mengintegrasikan faktor keberlanjutan dalam laporan tahunan mereka. Implementasi dari peraturan ini memberikan tekanan bagi perusahaan untuk menetapkan target lingkungan yang lebih jelas dan menantang agar dapat memenuhi ekspektasi regulator dan investor institusional.

Studi oleh Kolk dan Perego (2014) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki target lingkungan yang jelas mengalami peningkatan efisiensi operasional dan profitabilitas dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki struktur tata kelola yang baik, mekanisme pengawasan yang kuat, serta target keberlanjutan yang jelas akan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan *Return on Assets* dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki strategi keberlanjutan yang terukur.

Dengan demikian, *Goal-Setting Theory* memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk memahami bagaimana perusahaan dalam Indeks LQ45 dapat meningkatkan kinerja finansial mereka melalui pengungkapan kinerja lingkungan dan tata kelola perusahaan yang efektif. Integrasi strategi keberlanjutan ke dalam tata kelola perusahaan tidak hanya berdampak pada citra perusahaan tetapi juga memiliki dampak yang nyata terhadap stabilitas finansial dan daya saing di pasar modal Indonesia.

2.1.3. Pengungkapan Kinerja Lingkungan Berbasis GRI

1. Pengertian Pengungkapan Kinerja Lingkungan

Pengungkapan kinerja lingkungan merujuk pada penyampaian informasi oleh perusahaan mengenai dampak aktivitas operasionalnya terhadap lingkungan. Informasi ini mencakup aspek seperti emisi karbon, pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam, dan inisiatif keberlanjutan yang diimplementasikan perusahaan.

Menurut *Global Reporting Initiative* (GRI, 2020), pengungkapan kinerja lingkungan bertujuan untuk memastikan transparansi dalam mengkomunikasikan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan serta upaya untuk meminimalisir dampak negatifnya. *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984) menekankan bahwa transparansi ini penting untuk memenuhi ekspektasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, dan pemerintah.

Pendapat serupa disampaikan oleh Clarkson *et al.* (2008), yang mengemukakan bahwa pengungkapan lingkungan bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga instrumen penting untuk meningkatkan legitimasi perusahaan di mata pemangku kepentingan dan masyarakat. *Goal-Setting Theory* (Locke & Latham, 1990) memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa perusahaan yang menetapkan tujuan keberlanjutan yang jelas lebih termotivasi untuk mencapainya, sehingga pengungkapan kinerja lingkungan dapat mencerminkan pencapaian target keberlanjutan yang telah ditetapkan (Eccles *et al.*, 2014; Latham & Pinder, 2005).

Sementara itu, Deegan (2002) menambahkan bahwa transparansi dalam pengungkapan kinerja lingkungan sering kali dipengaruhi oleh tekanan dari regulator, investor, serta publik yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan. Dalam praktiknya, transparansi ini berperan penting dalam membangun kepercayaan publik dan

mengurangi risiko operasional terkait isu lingkungan (Bebbington *et al.*, 2008). Oleh karena itu, perusahaan yang secara proaktif menerapkan pengungkapan kinerja lingkungan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing mereka di pasar (Michelon *et al.*, 2015).

2. Indikator Pengungkapan Kinerja Lingkungan Berdasarkan GRI (301–305)

GRI menyediakan indikator spesifik untuk membantu perusahaan dalam melaporkan kinerja lingkungan mereka. Indikator ini meliputi:

1. GRI 301 (Penggunaan Material): Mengukur jenis dan jumlah bahan yang digunakan dalam proses produksi, termasuk bahan daur ulang.
2. GRI 302 (Konsumsi Energi): Mencakup konsumsi energi dari sumber terbarukan dan tidak terbarukan.
3. GRI 303 (Penggunaan dan Pengelolaan Air): Fokus pada pengelolaan sumber daya air dan pengolahan limbah cair.
4. GRI 304 (Keanekaragaman Hayati): Mencakup dampak aktivitas operasional terhadap ekosistem lokal dan langkah mitigasinya.
5. GRI 305 (Emisi Gas Rumah Kaca): Mencakup pengukuran dan pengurangan emisi karbon dari aktivitas operasional.

Menurut Locke & Latham (1990), perusahaan yang memiliki target keberlanjutan yang jelas dalam aspek-aspek yang diukur oleh standar GRI akan lebih efektif dalam mencapainya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi operasional (Berrone & Gomez-Mejia, 2009). Selain itu, dari perspektif *Stakeholder Theory*, transparansi dalam pengungkapan indikator-indikator tersebut berfungsi untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan terkait tanggung jawab lingkungan perusahaan (Grewal *et al.*, 2020).

3. Pengungkapan Kinerja Lingkungan di Indonesia

Di Indonesia, isu pengungkapan kinerja lingkungan semakin mendapat perhatian, terutama di kalangan perusahaan besar yang terdaftar dalam Indeks Saham LQ45. Indeks ini mencakup perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi pasar besar, likuiditas saham yang tinggi, serta tata kelola yang baik. Dengan posisinya yang strategis di pasar modal Indonesia, perusahaan dalam indeks ini memiliki kewajiban yang lebih besar untuk mempraktikkan transparansi dalam pengungkapan isu lingkungan.

Menurut Kusumadilaga (2010), perusahaan di Indonesia yang konsisten mengungkapkan kinerja lingkungan cenderung mendapatkan respons positif dari pasar dan mengalami peningkatan kepercayaan investor. Hal ini dikarenakan transparansi dalam pengelolaan isu lingkungan dapat mengurangi risiko operasional, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta menjaga reputasi perusahaan di mata publik. *Stakeholder Theory* mendukung temuan ini dengan menegaskan bahwa perusahaan yang berorientasi pada kepentingan berbagai pemangku kepentingan akan lebih stabil secara finansial dan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan investor dan masyarakat (Cheng *et al.*, 2014).

Selain itu, laporan KPMG (2022) mencatat bahwa 80% perusahaan besar di Indonesia yang mematuhi standar GRI dalam pelaporan keberlanjutan mengalami peningkatan nilai saham dan kepercayaan dari investor. *Goal-Setting Theory* menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki target keberlanjutan yang jelas dan diukur melalui standar seperti GRI akan lebih disiplin dalam pencapaiannya, sehingga meningkatkan kinerja finansial dan operasional mereka (Flammer, 2015).

Pentingnya pengungkapan kinerja lingkungan juga diperkuat oleh regulasi yang semakin ketat dari pemerintah Indonesia, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) Nomor 51 Tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, yang mewajibkan perusahaan publik untuk mengintegrasikan faktor keberlanjutan dalam laporan tahunan mereka.

Namun, meskipun banyak penelitian yang mendukung hubungan positif antara pengungkapan kinerja lingkungan dan kinerja keuangan, terdapat juga pandangan yang menyatakan bahwa dampaknya bisa bervariasi. Cho dan Patten (2007) berpendapat bahwa dalam beberapa kasus, pengungkapan lingkungan hanya digunakan sebagai strategi legitimasi tanpa dampak nyata terhadap profitabilitas perusahaan. Wagner *et al.* (2002) juga menunjukkan bahwa peningkatan transparansi lingkungan dapat menyebabkan kenaikan biaya operasional yang justru berdampak negatif terhadap profitabilitas.

Dengan demikian, transparansi dalam pengungkapan kinerja lingkungan tidak hanya menjadi kebutuhan untuk memenuhi regulasi, tetapi juga merupakan strategi penting dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Berdasarkan *Goal-Setting Theory*, perusahaan yang memiliki target lingkungan yang jelas dan terukur akan lebih efektif dalam mencapainya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja keuangan mereka. Sementara itu, dari perspektif *Stakeholder Theory*, transparansi dalam pengungkapan kinerja lingkungan merupakan alat untuk memenuhi ekspektasi berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan reputasi perusahaan, dan memperkuat hubungan dengan investor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana perusahaan-perusahaan di Indeks LQ45 menggunakan strategi pengungkapan lingkungan

yang sejalan dengan prinsip *Goal-Setting Theory* dan *Stakeholder Theory* dalam meningkatkan kinerja keuangan mereka.

2.1.4. Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yakni sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan untuk memastikan penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi *shareholder* dengan tetap perhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya. Prinsip dasar tata kelola perusahaan terdiri transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran (*fairness*) (Claessens & Yurtoglu, 2013).

Menurut OECD (2015), tata kelola perusahaan yang efektif memastikan perusahaan dijalankan dengan cara yang bertanggung jawab dan transparan, serta membantu meningkatkan kepercayaan dari investor serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan menurunkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan keberhasilan finansial Perusahaan (Fama & Jensen, 1983).

1. Proporsi Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan organ pengawas perusahaan yang memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa aktivitas pengelolaan bisnis dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), serta selaras dengan kepentingan para pemangku kepentingan (Adams & Ferreira, 2005). Fungsi pengawasan ini dijalankan melalui evaluasi terhadap kebijakan dan kinerja manajemen serta pemberian nasihat strategis dalam pengambilan keputusan penting.

Proporsi dewan komisaris independen, yaitu anggota dewan yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemilik maupun manajemen perusahaan, menjadi indikator

penting dalam menilai efektivitas tata kelola. Keberadaan komisaris independen dinilai mampu meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan terhadap manajemen, serta mengurangi potensi konflik kepentingan (Fama & Jensen, 1983; Kusnadi *et al.*, 2016).

Lebih lanjut, peran komisaris independen tidak hanya terbatas pada pengawasan kinerja keuangan, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong manajemen untuk menyampaikan informasi yang lebih lengkap dan bertanggung jawab, termasuk dalam hal pengungkapan kinerja lingkungan. Dalam konteks keberlanjutan, dewan komisaris independen dapat memberikan tekanan kepada manajemen untuk memperhatikan isu-isu non-finansial yang material, seperti emisi karbon, pengelolaan limbah, dan dampak lingkungan lainnya. Pengawasan yang ketat dari komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan, sekaligus mendorong integrasi aspek lingkungan ke dalam strategi bisnis perusahaan (Dhaliwal *et al.*, 2012; Rao & Tilt, 2016).

Dengan demikian, dewan komisaris independen tidak hanya berkontribusi terhadap perbaikan efisiensi dan profitabilitas perusahaan melalui pengawasan keuangan, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaporan lingkungan. Kedua aspek ini secara simultan dapat berdampak positif terhadap kepercayaan investor, reputasi perusahaan, dan pada akhirnya terhadap peningkatan kinerja keuangan.

2. Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu elemen penting dalam struktur tata kelola perusahaan yang bertugas mendukung dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya dalam hal integritas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Be'dard *et al.*, 2004). Dalam konteks penelitian ini,

keberadaan komite audit diukur berdasarkan jumlah anggotanya, yang mencerminkan kapasitas organisasi dalam mengalokasikan sumber daya pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan kontrol internal.

Jumlah anggota komite audit dapat menjadi indikator awal dari komitmen perusahaan terhadap praktik pengawasan yang lebih menyeluruh. Semakin banyak anggota komite audit, semakin besar potensi kapasitas untuk membagi tanggung jawab pengawasan, membahas temuan audit secara lebih mendalam, dan memberikan input terhadap kebijakan keuangan perusahaan. Menurut penelitian Abbott *et al.* (2004), keberadaan komite audit yang memenuhi syarat minimum struktur keanggotaan sudah terbukti berkontribusi pada peningkatan transparansi laporan keuangan dan pengurangan risiko manipulasi informasi akuntansi.

Dalam kerangka teori stakeholder, komite audit berperan dalam menjaga kepentingan pemangku kepentingan melalui pengawasan atas kejujuran dan transparansi pelaporan. Hal ini penting karena informasi keuangan yang akurat menjadi dasar pengambilan keputusan investasi oleh investor dan kreditor (Freeman, 1984). Keberadaan komite audit yang cukup kuat dari segi jumlah dapat memperkuat persepsi bahwa perusahaan memiliki struktur pengawasan yang memadai, meskipun efektivitasnya tetap sangat bergantung pada faktor-faktor lain seperti kompetensi dan frekuensi rapat yang tidak diukur dalam penelitian ini.

2.1.5. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan yakni gambaran mengenai kemampuan perusahaan mengelola sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan ekonomi yang optimal, seperti meningkatkan laba, efisiensi operasional, dan nilai perusahaan (Brigham & Houston, 2018). Kinerja keuangan juga mencerminkan efektivitas dan efisiensi

manajemen dalam mengelola aset, kewajiban, serta ekuitas untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi para pemangku kepentingan.

Menurut Horne dan Wachowicz (2008), kinerja keuangan diukur berdasarkan hasil dari berbagai keputusan keuangan yang dibuat manajemen perusahaan, yang melibatkan aspek profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, serta efisiensi operasional. Sementara itu, Weston dan Copeland (1992) menjelaskan bahwa kinerja keuangan dapat dinilai melalui indikator seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Earnings per Share* (EPS), serta rasio keuangan lainnya.

Brigham & Houston (2018) juga menambahkan bahwa kinerja keuangan tidak hanya dilihat dari hasil finansial, tapi juga dari bagaimana perusahaan mampu memenuhi ekspektasi investor, menjaga stabilitas operasional, serta merespons perubahan lingkungan bisnis dengan efektif.

Indikator umum untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan meliputi:

- *Return on Assets* (ROA): menilai proporsi total aset perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba bersih. Ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari asetnya disebut ROA (Horne & Wachowicz, 2008).
- *Return on Equity* (ROE): menilai profitabilitas bisnis berdasarkan ekuitas yang dimiliki pemegang saham (Weston & Copeland, 1992).
- *Net Profit Margin* (NPM): menjelaskan jumlah laba bersih yang didapat suatu bisnis dari tiap penjualan yang dilakukannya (Brigham & Houston, 2019).
- *Tobin's Q*: Mengukur nilai pasar aset perusahaan dibandingkan nilai buku asetnya. Rasio ini sering digunakan untuk menilai persepsi investor pada pertumbuhan perusahaan di masa depan (Chung & Pruitt, 1994).

2.1.6. Return on Assets (ROA)

ROA yakni rasio keuangan untuk mengevaluasi seberapa baik bisnis menggunakan semua asetnya untuk hasilkan laba bersih. Gambaran umum efisiensi manajemen dalam mengalokasikan sumber daya bisnis untuk menghasilkan laba diberikan oleh rasio ini. Menurut Brigham dan Houston (2016), ROA menunjukkan sejauh mana aset yang dimiliki perusahaan dapat digunakan secara produktif untuk mendukung profitabilitas. ROA dihitung dengan formula berikut:

$$ROA \text{ (Return on Asset)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Di mana:

- Laba Bersih yakni keuntungan yang didapat perusahaan sesudah dikurangi dengan pajak, biaya bunga, serta beban lainnya.
- Total Aset merujuk pada jumlah nilai dari semua aset yang dimiliki perusahaan, baik itu aset tetap (seperti properti serta peralatan) maupun aset lancar (seperti kas dan piutang).

Menurut Horne dan Wachowicz (2010), ROA telah lama menjadi indikator utama untuk mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan. Sebagai indikator yang menghubungkan laba bersih dengan total aset, ROA menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien untuk menggapai hasil yang diinginkan

Lebih lanjut, Brealey *et al.* (2011) ROA yakni salah satu rasio keuangan yang paling mendasar karena relevansinya dalam mengukur produktivitas aset perusahaan. ROA juga memberikan informasi penting bagi investor serta pemangku kepentingan lainnya, karena menunjukkan potensi pengembalian investasi dan stabilitas operasional

perusahaan. Brealey *et al.* (2011) menyoroti bahwa ROA dapat memberikan gambaran luas tentang bagaimana bisnis menghasilkan uang dari asetnya, yang membantu pemangku kepentingan dan investor dalam membuat keputusan.

1. Sejarah dan Relevansi ROA

Penggunaan ROA sebagai alat analisis keuangan telah berkembang sejak pertengahan abad ke-20. Brigham dan Houston (2016) mencatat bahwa popularitas ROA meningkat seiring dengan kebutuhan untuk mengevaluasi efisiensi pengelolaan aset di lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Rasio ini awalnya untuk membandingkan kinerja antar perusahaan dalam industri yang sama, tetapi kini diterapkan secara luas untuk menilai kinerja operasional, pengelolaan aset, dan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan.

Sebagai alat evaluasi, ROA tidak hanya memberikan gambaran tentang efisiensi operasional, tetapi juga menjadi dasar untuk pengambilan keputusan strategis. Brealey *et al.* (2011) menegaskan bahwa ROA yang tinggi tunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset dengan optimal, sedangkan ROA yang rendah dapat menjadi sinyal perlunya perbaikan dalam strategi pengelolaan aset.

ROA memiliki beberapa kegunaan penting yang menjadikannya salah satu rasio keuangan utama dalam analisis kinerja perusahaan:

1. Mengukur Efisiensi Operasional: ROA menawarkan pandangan komprehensif tentang seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya menghasilkan laba. Menurut Helfert (2001), ROA yang tinggi tunjukkan manajemen yang efisien dalam mengelola sumber daya perusahaan, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan profitabilitas.

2. Alat Perbandingan Antar Perusahaan: ROA memungkinkan analisis perbandingan antar perusahaan dalam industri yang sama. Penman (2010) menekankan bahwa perusahaan dengan ROA yang lebih tinggi dianggap lebih efisien dalam memanfaatkan aset dibandingkan dengan pesaingnya, yang menjadikannya lebih menarik bagi investor dan *stakeholder* lainnya.
3. Indikator Keputusan Investasi: Investor menggunakan ROA sebagai tolok ukur untuk menilai potensi keuntungan dari perusahaan. Brigham dan Houston (2016) mencatat bahwa ROA menyediakan informasi penting yang dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih tepat.
4. Evaluasi Kinerja Manajemen: Selain itu, ROA berfungsi sebagai alat penilaian internal untuk mengukur seberapa baik manajemen menangani aset perusahaan. ROA membantu manajemen dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau restrukturisasi.

2. ROA dalam Konteks Penelitian Ini

Pada penelitian ini, ROA dipilih sebagai indikator utama untuk ukur kinerja keuangan perusahaan sebab relevansinya dalam mencerminkan efisiensi operasional. Perusahaan dalam Indeks LQ45, yang merupakan entitas dengan kapitalisasi pasar dan likuiditas tertinggi di Indonesia, memiliki aset yang signifikan dan kompleksitas operasional yang tinggi. Oleh sebab itu, ROA menjadi alat yang ideal untuk mengevaluasi kinerja keuangan mereka, terutama dalam konteks efisiensi penggunaan aset.

Selain itu, ROA relevan dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pengaruh pengungkapan kinerja lingkungan dan tata kelola perusahaan terhadap profitabilitas. Nissim dan Penman (2001) menegaskan bahwa ROA memberikan hubungan langsung antara laba bersih yang dihasilkan dan sumber daya yang digunakan, sehingga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan perusahaan. Laux dan Leuz (2010) juga mencatat bahwa perusahaan dengan ROA yang tinggi lebih menarik bagi investor karena mencerminkan efisiensi operasional dan pengembalian investasi yang stabil.

2.2. Tinjauan Empiris

Studi mengenai praktik pengungkapan kinerja lingkungan serta tata kelola perusahaan telah banyak dikaji oleh berbagai peneliti, baik dalam lingkup nasional maupun global. Studi-studi sebelumnya mengilustrasikan keterkaitan antarvariabel yang diteliti, sekaligus menyajikan temuan-temuan yang didapat dari beragam konteks dan pendekatan metodologis. Penelitian-penelitian ini juga mendukung integrasi *Goal-Setting Theory* dan *Stakeholder Theory* dalam menjelaskan dampak pengungkapan lingkungan dan tata kelola terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian Fabiola *et al.* (2024) mengkaji dampak dari pengungkapan terkait lingkungan, sosial, serta tata kelola pada kinerja keuangan perusahaan. Hasil studi ini mengindikasikan bahwa pengungkapan lingkungan berdampak positif yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan, sementara pengungkapan sosial serta tata kelola tidak menunjukkan dampak signifikan. Penelitian ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai aspek lingkungan dalam meningkatkan kepercayaan investor dan memperbaiki kinerja perusahaan, sejalan dengan *Stakeholder Theory*, di

mana perusahaan yang memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan cenderung lebih stabil secara finansial.

Penelitian De Lavanda & Meiden (2022) mengkaji pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan serta tata kelola perusahaan terhadap performa keuangan. Temuan mereka menunjukkan bahwa *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), keberadaan dewan komisaris independen, serta peran komite audit memberikan pengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan. Di sisi lain, kepemilikan institusional serta peran dewan direksi tidak menunjukkan dampak signifikan. Studi ini menegaskan bahwa efektivitas tata kelola dapat membantu perusahaan mencapai target keberlanjutan yang lebih jelas, yang sesuai dengan prinsip *Goal-Setting Theory*.

Penelitian Qorib *et al.* (2024) menunjukkan bagaimana kinerja keuangan dan risiko keuangan perusahaan dipengaruhi oleh kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan serta sosial berdampak positif pada kinerja keuangan, sementara tata kelola tidak berdampak signifikan. Penelitian ini menegaskan bahwa isu lingkungan dan sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, yang sejalan dengan temuan Clarkson *et al.* (2008) bahwa transparansi dalam pengelolaan lingkungan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat citra perusahaan.

Di sisi lain, penelitian Putri *et al.* (2023) meneliti dampak kinerja di sektor lingkungan, sosial, serta tata kelola pada kinerja serta risiko keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia. Temuan mereka mengindikasikan bahwa meskipun investasi serta pengungkapan terkait lingkungan tidak memberikan pengaruh signifikan pada kinerja keuangan, kinerja lingkungan terbukti berdampak positif yang signifikan. Hal ini

menyoroti pentingnya penetapan tujuan lingkungan yang jelas untuk memastikan bahwa investasi dalam keberlanjutan menghasilkan dampak yang nyata, sesuai dengan *Goal-Setting Theory*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikaji, terdapat beberapa temuan penting terkait hubungan antara variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Pertama, pengungkapan kinerja lingkungan umumnya menunjukkan hubungan yang positif dengan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan lingkungan dapat meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi risiko lingkungan, serta memperkuat citra perusahaan di mata pemangku kepentingan (Fabiola *et al.*, 2024; Qorib *et al.*, 2024). *Stakeholder Theory* menegaskan bahwa transparansi dalam isu lingkungan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan karena memenuhi ekspektasi berbagai pemangku kepentingan.

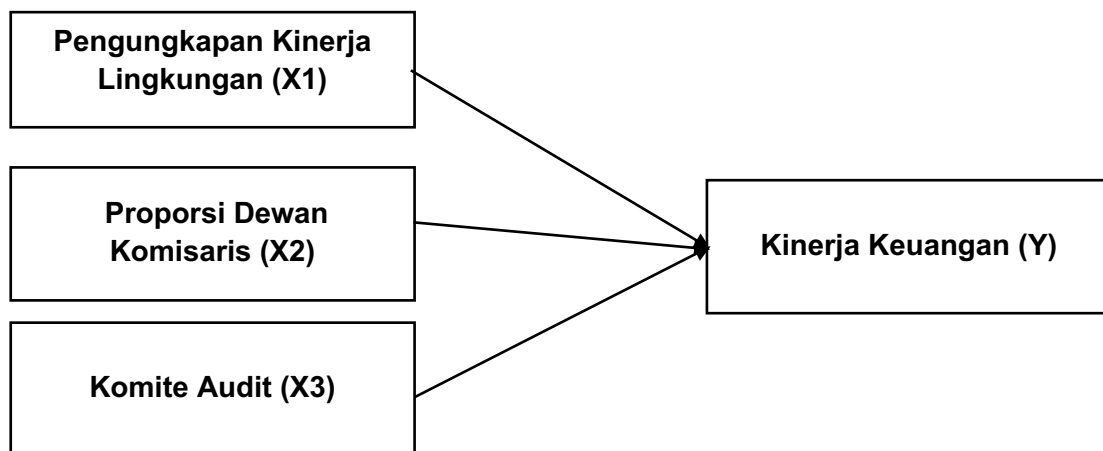
Selanjutnya, efektivitas tata kelola perusahaan, yang diukur melalui proporsi dewan komisaris independen serta keberadaan komite audit, terbukti memberikan pengaruh signifikan pada kinerja keuangan. Penelitian De Lavanda & Meiden (2022) menegaskan bahwa keberadaan dewan komisaris independen serta kinerja komite audit yang baik dapat memperbaiki transparansi dan akuntabilitas perusahaan, yang akhirnya berdampak positif pada kinerja keuangan. Di sisi lain, penelitian Qorib *et al.* (2024) menunjukkan bahwa faktor tata kelola perusahaan tidak selalu berdampak signifikan pada kinerja keuangan, yang mengindikasikan bahwa efektivitas tata kelola bergantung pada bagaimana perusahaan menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan keberlanjutan secara strategis.

Secara keseluruhan, interaksi antara pengungkapan kinerja lingkungan serta tata kelola perusahaan menghasilkan berbagai temuan dalam penelitian yang ada. Beberapa

studi menunjukkan bahwa kombinasi kedua faktor ini dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap kinerja keuangan, sementara penelitian lainnya memberikan hasil yang kurang konsisten (Putri *et al.*, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali hubungan antara pengungkapan kinerja lingkungan, tata kelola perusahaan, dan kinerja keuangan dalam konteks Indeks LQ45, dengan mempertimbangkan perspektif *Goal-Setting Theory* dalam penetapan target lingkungan serta *Stakeholder Theory* dalam memenuhi harapan pemangku kepentingan.

2.3. Kerangka Penelitian

Merujuk pada analisis teori serta studi-studi terdahulu yang mengkaji pengaruh pengungkapan kinerja lingkungan serta tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan, berikut ini disajikan kerangka konseptual yang dapat digambarkan



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.4. Pengembangan Hipotesis

Penjelasan terkait hipotesis di penelitian ini, yang didasarkan pada teori-teori yang ada serta didukung penelitian sebelumnya:

2.4.1. Pengaruh Pengungkapan Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Pengungkapan kinerja lingkungan merupakan bentuk transparansi perusahaan dalam melaporkan aktivitas dan dampak operasionalnya terhadap lingkungan. Pengungkapan ini umumnya disampaikan melalui laporan keberlanjutan yang mengacu pada standar seperti *Global Reporting Initiative* (GRI).

Berdasarkan *Goal-Setting Theory*, perusahaan yang menetapkan tujuan keberlanjutan yang jelas akan lebih terdorong untuk mencapainya, sehingga pengungkapan kinerja lingkungan mencerminkan upaya sistematis perusahaan dalam mencapai target keberlanjutan yang telah ditentukan (Locke & Latham, 1990). Selain itu, dalam *Stakeholder Theory*, pengungkapan kinerja lingkungan menjadi media komunikasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan, yang dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan (Freeman, 1984).

Penelitian terdahulu oleh Clarkson *et al.* (2011) dan Fabrizi *et al.* (2014) menunjukkan bahwa perusahaan dengan pengungkapan lingkungan yang lebih baik cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih tinggi. Di Indonesia, penelitian oleh Fabiola *et al.* (2024) dan Qorib *et al.* (2024) juga menemukan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H₁ : Pengungkapan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.4.2. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Memastikan bahwa pengelolaan perusahaan mematuhi prinsip tata kelola yang baik dan kepentingan pemegang saham merupakan tanggung jawab strategis dewan komisaris. Berdasarkan *Goal-Setting Theory*, dewan komisaris yang memiliki peran aktif dalam menetapkan kebijakan strategis dapat mendorong pencapaian target keuangan dan operasional perusahaan secara lebih optimal (Latham & Pinder, 2005). Dalam *Stakeholder Theory*, dewan komisaris memastikan bahwa kepentingan berbagai pemangku kepentingan diakomodasi dalam kebijakan strategis perusahaan (García-Sánchez *et al.*, 2020).

Struktur dewan komisaris yang efektif, seperti proporsi komisaris independen yang memadai, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Penelitian terdahulu oleh De Lavanda & Meiden (2022) menemukan bahwa dewan komisaris independen berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan. Kusnadi *et al.* (2020) juga menemukan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, semakin baik kinerja perusahaan karena pengawasan yang lebih ketat. Namun, Qorib & Dwi Mulyani (2024) menunjukkan bahwa dampak dewan komisaris pada kinerja keuangan dapat bervariasi tergantung pada konteks industri dan ukuran perusahaan. Dengan demikian, hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H₂ : Proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

2.4.3. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Komite audit memiliki tanggung jawab untuk memastikan integritas laporan keuangan serta efektivitas sistem pengendalian internal. Berdasarkan *Goal-Setting*

Theory, komite audit yang menetapkan tujuan yang jelas dalam tata kelola dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi dan regulasi (Berrone & Gomez-Mejia, 2009). Dalam *Stakeholder Theory*, keberadaan komite audit yang efektif menciptakan transparansi dalam penyajian informasi keuangan, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya (Grewal *et al.*, 2020).

Penelitian oleh De Lavanda & Meiden (2022) menemukan bahwa komite audit yang aktif dan kompeten berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan. Studi serupa oleh Abbott *et al.* (2004) menunjukkan bahwa komite audit yang kuat meningkatkan transparansi dan keandalan laporan keuangan. Selain itu, Klein (2002) menemukan bahwa perusahaan dengan komite audit yang lebih aktif memiliki kinerja keuangan yang lebih baik karena mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Al-Matari *et al.* (2014) juga menunjukkan bahwa efektivitas komite audit memiliki korelasi positif dengan profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

H₃ : Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan